

BRICS as an Alternative Power in the World Economy: An Economic Policy Analysis of Indonesia's Bargaining Position and Competitiveness in the Global Market

Heru Prastyo¹, Lukman Yudho Prakoso^{2*}, M. Risahdi³

Universitas Pertahanan RI

Corresponding Author: Lukman Yudho Prakoso lukman.prakoso@idu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords : BRICS,
Implementation, Policy,
Economy

Received : 07 July 2025

Revised : 27 July 2025

Accepted: 29 August 2025

©2025 Prastyo, Prakoso, Risahdi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The threat of a global economic crisis demands that Indonesia seek alternative solutions to maintain stability and enhance national competitiveness. This study aims to analyze the potential of BRICS as an alternative global economic power in relation to Indonesia's bargaining position in the global market. Using a qualitative descriptive method with Lukman Yudho Prakoso's implementation theory (integrative, interactive, transparent, accountable control), this study evaluates Indonesia's economic policy readiness to face multipolar dynamics. The results show that joining BRICS provides opportunities for increased export market access, development funding, technology transfer, and strengthening local currency-based payment systems. In conclusion, BRICS offers strategic benefits for Indonesia in facing global shocks, with relatively manageable negative risks through economic diplomacy and adaptive national industrial policies.

Brics Sebagai Kekuatan Alternatif Ekonomi Dunia: Analisis Kebijakan Ekonomi Terhadap Posisi Tawar dan Daya Saing Indonesia di Pasar Global

Heru Prastyo¹, Lukman Yudho Prakoso^{2*}, M. Risahdi³

Universitas Pertahanan RI

Corresponding Author: Lukman Yudho Prakoso lukman.prakoso@idu.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: BRICS, Implementasi, Kebijakan, Ekonomi

Received : 07 Juli 2025

Revised : 27 Juli 2025

Accepted: 29 Agustus 2025

©2025 Prastyo, Prakoso, Risahdi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Ancaman krisis ekonomi global menuntut Indonesia mencari alternatif solusi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi BRICS sebagai kekuatan ekonomi alternatif dunia terhadap posisi tawar Indonesia di pasar global. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi Lukman Yudho Prakoso (integratif, interaktif, transparan, kontrol akuntabel), penelitian ini mengevaluasi kesiapan kebijakan ekonomi Indonesia menghadapi dinamika multipolar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bergabung dengan BRICS memberikan peluang peningkatan akses pasar ekspor, pendanaan pembangunan, transfer teknologi, serta penguatan sistem pembayaran berbasis mata uang lokal. Kesimpulannya, BRICS menawarkan manfaat strategis bagi Indonesia dalam menghadapi guncangan global, dengan risiko negatif yang relatif dapat dikendalikan melalui diplomasi ekonomi dan kebijakan industri nasional yang adaptif.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, perubahan struktur tatanan ekonomi global menunjukkan bergesernya dominasi negara-negara Barat menuju munculnya kekuatan baru dari negara berkembang. BRICS, sebuah blok yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, secara konsisten diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi alternatif di luar negara maju kelompok G7. International Monetary Fund (2023) memproyeksikan bahwa kontribusi ekonomi kelompok BRICS terhadap PDB dunia telah mencapai 31,5%, lebih tinggi dari kontribusi kolektif G7 sebesar 30,7%. Fakta ini memperlihatkan munculnya peluang pembentukan arsitektur ekonomi multipolar di mana peran negara berkembang semakin kuat dalam menentukan arah ekonomi global.

Di sisi lain, dinamika global saat ini memperlihatkan adanya gelombang ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Krisis pangan dan energi yang terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina telah mendorong kenaikan harga komoditas hingga lebih dari 100% dalam dua tahun terakhir (International Energy Agency, 2023; World Bank, 2023). Sementara itu, kenaikan suku bunga The Fed menyebabkan terjadinya arus modal keluar di negara berkembang serta melemahnya kurs mata uang lokal secara signifikan. Situasi ini menyoroti rapuhnya ketergantungan negara-negara berkembang terhadap sistem keuangan global berbasis dolar AS (Stiglitz, 2022). Kondisi gagal bayar seperti yang dialami Sri Lanka dan tekanan fiskal di Pakistan menjadi simbol bahwa banyak negara rentan terhadap gejolak eksternal akibat keterhubungan ekonomi global (World Bank, 2023).

Sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak terlepas dari efek rambatan tersebut. Ketergantungan terhadap impor barang modal dan pangan menyebabkan kenaikan harga serta tekanan inflasi domestik. Kurs rupiah terhadap dolar AS bergerak sangat fluktuatif, berkisar Rp14.800–Rp16.300 sepanjang 2023–2024 (Bank Indonesia, 2024). Sementara itu, defisit transaksi berjalan Indonesia masih terjadi di sektor barang modal dan teknologi tinggi. Tantangan terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan memperlihatkan perlunya diversifikasi kemitraan ekonomi nontradisional agar mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam konteks demikian, BRICS menawarkan peluang bagi Indonesia sebagai akses terhadap pasar ekspor baru ekonomi non-Barat, sumber pembiayaan alternatif dari New Development Bank, serta kemitraan teknologi dan industrialisasi melalui skema kerja sama Selatan–Selatan (South-South Cooperation). Diskursus mengenai de-dolarisasi di dalam BRICS, termasuk wacana penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antaranggota, membuka opsi bagi Indonesia untuk mengurangi tekanan volatilitas eksternal berbasis dolar AS (Ocampo, 2023). Selain itu, negara anggota BRICS seperti Tiongkok dan India telah menjadi mitra dagang utama Indonesia, di mana nilai perdagangan Indonesia–Tiongkok mencapai USD127 miliar pada 2023 dan Indonesia–India menembus USD32 miliar (UN Comtrade, 2024). Hal itu menandakan bahwa keikutsertaan dalam BRICS dapat memperdalam potensi ekonomi yang sudah berlangsung secara bilateral.

Namun, peluang bergabungnya Indonesia dalam BRICS juga mengandung sejumlah risiko. Pertama, BRICS bukanlah organisasi ekonomi homogen; perbedaan kepentingan strategis dapat mempersulit pengambilan keputusan. Kedua, Tiongkok dan India telah memiliki struktur industri manufaktur serta teknologi lebih kuat sehingga potensi penetrasi produk BRICS ke pasar domestik Indonesia cenderung lebih besar jika proteksi industri nasional rendah. Ketiga, karena BRICS menonjol sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap Barat, maka keterlibatan Indonesia berpotensi menyeret posisi Indonesia dalam rivalitas geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin menguat (Wilson, 2021). Sementara itu, prinsip luar negeri Indonesia bebas aktif mendorong pemerintahan mengambil langkah-langkah yang tidak secara langsung berpihak pada satu kutub.

Dari sisi daya saing, Global Competitiveness Index menempatkan Indonesia di peringkat ke-45 dunia pada 2023, sementara Tiongkok berada di peringkat ke-28 dan India posisi ke-43 (World Economic Forum, 2023). Kualitas riset, produktivitas sektor manufaktur, dan indeks inovasi Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara anggota BRICS lainnya. Selain itu, sektor industri pengolahan nasional memberikan kontribusi terhadap PDB hanya 18,3% dan mengalami stagnasi selama lima tahun terakhir (BPS, 2024), menggambarkan adanya keterbatasan kapasitas hilirisasi yang dapat mempengaruhi bargaining power Indonesia dalam integrasi ekonomi regional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana BRICS sebagai kekuatan ekonomi alternatif dunia mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia dan memperkuat daya saingnya di pasar global. Penelitian ini juga akan mengkaji risiko ancaman ekonomi global di masa depan, seperti krisis pangan, konflik geopolitik panjang, perubahan iklim, kebijakan proteksionisme negara maju, serta bagaimana kemungkinan dampak negatif ataupun kendala nasional apabila Indonesia bergabung dengan BRICS. Dengan demikian, studi ini diperlukan untuk menghasilkan basis argumentasi empiris mengenai apakah langkah Indonesia bergabung ke BRICS dapat menjadi instrumen memperkuat pembangunan ekonomi nasional jangka panjang atau justru memunculkan kerentanan baru dalam perekonomian Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi potensi manfaat strategis bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS terhadap peningkatan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global, sekaligus mengidentifikasi kendala dan dampak negatif yang mungkin timbul, baik dalam konteks domestik (kesiapan industri dan teknologi) maupun eksternal (rivalitas geopolitik, kesenjangan ekonomi antaranggota BRICS). Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah dalam merancang strategi integrasi ekonomi global yang adaptif, selektif, dan selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembentukan BRICS sebagai kekuatan ekonomi alternatif global dipahami sebagai respon terhadap asimetri sistem ekonomi internasional yang didominasi oleh negara-negara Barat. Teori hegemoni baru menyebutkan bahwa munculnya kekuatan ekonomi Global South merupakan langkah menuju tata

ekonomi multipolar (Wilson, 2021). BRICS tidak hanya menjadi forum diplomatik, namun juga sarana institusional melalui pembentukan New Development Bank (NDB) yang memungkinkan alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur negara berkembang (Ocampo, 2023). Dalam konteks Indonesia, pembahasan keanggotaan BRICS menjadi strategis guna memperkuat posisi tawar ekonomi, terutama dalam menghadapi risiko perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, serta pemulihan pasca-pandemi (World Bank, 2023).

Implementasi kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia dalam melihat potensi bergabung dengan BRICS dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso, yang menekankan empat faktor utama: integratif, interaktif, transparan, dan control akuntabel (Prakoso, 2022). Faktor integratif menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antar kementerian dalam merumuskan pendekatan ekonomi luar negeri alternatif. Faktor interaktif menggarisbawahi keterlibatan pemangku kepentingan seperti pelaku industri, akademisi, maupun lembaga pembiayaan dalam proses formulasi kebijakan. Transparan menuntut adanya kejelasan informasi terkait manfaat, risiko, dan komitmen Indonesia jika bergabung dengan BRICS. Sedangkan control akuntabel berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kebijakan pro-BRICS tetap dalam kontrol nasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah negara dalam berintegrasi dengan BRICS sangat bergantung pada kesiapan internal dalam memperkuat industri hilir, diplomasi perdagangan, serta ketahanan fiskal (Stiglitz, 2022). Oleh karena itu, kajian ini memandang bahwa penerapan teori implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso menjadi landasan penting untuk menilai kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan peluang BRICS di tengah ancaman keterbukaan ekonomi global yang semakin tinggi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), yakni suatu metode yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi sistematis berdasarkan perspektif partisipan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan ekonomi BRICS sebagai kekuatan alternatif global serta implikasinya terhadap posisi tawar dan daya saing Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari kementerian terkait (Kemenlu, Kemenko Perekonomian, KKP), akademisi bidang ekonomi internasional, dan pelaku usaha ekspor-impor. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi BRICS, publikasi Bank Dunia, IMF, World Economic Forum, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi dokumen, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña (2018) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan keandalan temuan. Desain ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor integratif, interaktif, transparan, dan control akuntabel dalam

implementasi kebijakan bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta menilai potensinya dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai kekuatan ekonomi alternatif dunia dinilai cukup tinggi untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saing Indonesia, terutama jika implementasi kebijakan didasarkan pada penerapan empat faktor teori implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso, yaitu integratif, interaktif, transparan, dan kontrol akuntabel.

Faktor Integratif

Dari sisi kebijakan, koordinasi antarkementerian sudah berjalan secara bertahap melalui pembentukan task force BRICS yang terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Keberadaan gugus tugas ini dinilai sebagai langkah awal membangun integrasi kebijakan diplomasi ekonomi dan perdagangan luar negeri. Secara kuantitatif, tercatat bahwa 30,8% ekspor Indonesia pada tahun 2023 ditujukan kepada negara anggota BRICS dengan total nilai USD 81,2 miliar, meningkat 12,7% dibanding tahun sebelumnya (BPS, 2024). Selain itu, ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok tumbuh sebesar 16,8%, sementara ke India meningkat 11,1%. Fakta ini menunjukkan peluang konkret untuk memperluas pasar ekspor manufaktur, mineral, dan pertanian nasional. Namun integrasi kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya sejalan di tingkat operasional karena sebagian besar ekspor masih didominasi komoditas mentah, sementara impor produk manufaktur dari BRICS mencapai USD 73 miliar pada tahun yang sama (UN Comtrade, 2024).

Faktor Interaktif

Dari perspektif interaktif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah telah melibatkan berbagai aktor non-pemerintah ke dalam proses kajian, termasuk asosiasi pengusaha, akademisi, UMKM ekspor, dan lembaga riset. KADIN dan Apindo menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia berpotensi memperbesar akses pasar produk manufaktur berbasis hilirisasi nikel, karet, kelapa sawit, dan makanan olahan ke negara-negara BRICS termasuk Brasil dan Afrika Selatan yang selama ini belum tergarap signifikan. Pelibatan dalam forum business matching menunjukkan keberhasilan awal dengan peningkatan nilai kontrak dagang Indonesia-Brasil sebesar USD 286 juta pada pameran Indonesian Trade Promotion 2023. Selain itu, sektor perikanan dan pertanian memperoleh peluang pembiayaan proyek dari New Development Bank, yang mematok bunga pinjaman 2–3% lebih rendah dari Bank Dunia (NDB, 2023). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelibatan sektor keuangan swasta masih terbatas, menyebabkan akses perusahaan nasional terhadap fasilitas pembiayaan BRICS belum optimal.

Faktor Transparan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat transparansi kebijakan menuju BRICS masih dinilai rendah oleh publik dan akademisi karena pemerintah belum menyediakan white paper resmi atau dokumen publik mengenai manfaat, risiko, dan posisi tawar Indonesia. Secara kuantitatif, survei Indikator Politik (2024) menunjukkan 62,7% responden mendukung Indonesia bergabung dengan BRICS, tetapi 54,2% dari mereka belum memahami konsekuensi ekonomi dan politik dari keputusan tersebut. Kurangnya pemaparan terbuka ini dapat menimbulkan resistensi publik jika nanti kebijakan menuntut komitmen fiskal yang besar. Pembelajaran dari Afrika Selatan dan India menunjukkan bahwa penyediaan dokumen cost-benefit analysis yang akuntabel membantu menjaga legitimasi publik pada saat negara tersebut resmi bergabung dengan BRICS (Wilson, 2021).

Faktor Kontrol Akuntabel

Dalam konteks kontrol akuntabel, hasil penelitian menegaskan kebutuhan mendesak penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan lintas lembaga agar kebijakan integrasi dengan BRICS tetap sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang. Data menunjukkan bahwa Logistics Performance Index Indonesia meningkat ke posisi 63 pada tahun 2023, namun masih tertinggal dibanding Tiongkok (19) dan India (38) (World Bank, 2023). Artinya, kesiapan infrastruktur logistik domestik perlu ditingkatkan agar produk nasional mampu bersaing secara harga dan kualitas di pasar BRICS. Mekanisme audit, pengawasan DPR, serta sistem perencanaan fiskal jangka menengah perlu dikaitkan dengan target industrialisasi nasional agar partisipasi BRICS tidak menghasilkan ketergantungan impor. Meskipun demikian, peluang arah kontrol fiskal dapat dikelola apabila pembiayaan proyek strategis menggunakan skema mixed financing dari NDB, Islamic Development Bank, dan APBN secara proporsional.

Kelebihan dan Kemanfaatan Bagi Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa secara empiris, BRICS menawarkan sejumlah manfaat strategis bagi Indonesia, meliputi:

- Diversifikasi pasar ekspor nontradisional – memperbesar posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global yang selama ini didominasi negara-negara Barat.
- Akses pembiayaan alternatif – New Development Bank menawarkan pinjaman yang lebih fleksibel dan cepat dibanding World Bank dan IMF, mendukung pembangunan IKN Nusantara, transisi energi, dan industrialisasi.
- Instrument de-dolarisasi – penggunaan local currency settlement dalam BRICS berpotensi memperkuat ketahanan rupiah terhadap gejolak eksternal.
- Kenaikan posisi tawar geopolitik – Indonesia bisa memainkan peran strategis sebagai jembatan antara Global South dan kekuatan Barat, memperluas bargaining power diplomatik.

- Transfer teknologi dan peningkatan daya saing – peluang kerja sama teknologi manufaktur 4.0 dengan India dan Tiongkok dapat mempercepat pengembangan industri dalam negeri.

Temuan Utama

Dari keseluruhan analisis, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan bergabungnya Indonesia dalam BRICS berada dalam kategori “cukup siap secara peluang” namun masih “moderasi” dari sisi kesiapan struktural industri dan keterbukaan informasi. Penerapan teori Lukman Yudho Prakoso menunjukkan bahwa faktor integratif dan interaktif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesiapan Indonesia, sedangkan faktor transparansi dan kontrol akuntabel masih memerlukan penguatan untuk memastikan kebijakan sejalan dengan kepentingan nasional dan mendapat dukungan publik yang luas.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk bergabung dalam BRICS akan memberikan keuntungan strategis yang sangat besar, terutama dalam memperkuat posisi tawar dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di pasar global. Analisis berdasarkan faktor teori implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso (integratif, interaktif, transparan, dan kontrol akuntabel) menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal oleh Indonesia karena struktur ekonomi, diplomasi, dan potensi nasional sangat selaras dengan orientasi kerja sama BRICS sebagai kekuatan ekonomi alternatif dunia.

Indonesia sangat diuntungkan dalam BRICS

Secara ekonomi, Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 5,1% per tahun (BPS, 2024). Selain itu, cadangan devisa Indonesia mencapai USD 146,4 miliar per Mei 2024 (Bank Indonesia, 2024), memperlihatkan kemampuan fiskal dan moneter yang relatif kuat. Jika bergabung dengan BRICS, Indonesia diproyeksikan mendapatkan akses pada market base lebih dari 3,6 miliar penduduk dunia dan cakupan PDB gabungan senilai USD 28 triliun (IMF, 2023). BRICS menyediakan peluang ekspor besar bagi komoditas unggulan Indonesia seperti nikel, batu bara, crude palm oil (CPO), tembaga, serta sektor manufaktur makanan olahan dan tekstil sebagai penopang industri hilir.

Data UN Comtrade (2024) memperlihatkan bahwa kapasitas ekspor Indonesia ke Tiongkok, India, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan dapat meningkat rata-rata sebesar 10,3% per tahun selama periode 2025–2030 dengan potensi kenaikan nilai ekspor hingga USD 120 miliar jika sinergi kebijakan BRICS berjalan optimal. Selain pasar, Indonesia juga akan sangat diuntungkan dari keberadaan New Development Bank (NDB) yang memiliki alokasi pendanaan murah rata-rata di bawah 4% bunga per tahun, jauh lebih rendah dari rata-rata pinjaman komersial internasional (NDB, 2023). Pinjaman NDB dapat diarahkan untuk pengembangan hilirisasi mineral strategis, transisi energi, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyeksi Bappenas (2024) menyebutkan bahwa jika pendanaan hilirisasi nikel dan bauksit didukung

BRICS, maka PDB Indonesia dari sektor hilir pertambangan dapat melonjak dari 2,1% menjadi 4,3% pada tahun 2032.

Tidak Mengganggu Hubungan Ekonomi Lama

Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS tidak lantas mengganggu hubungan ekonomi dengan kekuatan lama seperti Amerika Serikat, Inggris, serta Uni Eropa. Sebaliknya, Indonesia dapat memainkan posisi strategis sebagai “jembatan” antara Global South dan Global North. Diplomasi ekonomi bebas aktif yang selama ini dipegang Indonesia memungkinkan penguatan berbagai blok secara seimbang. Terbukti, meskipun Indonesia semakin intensif berdagang dengan Tiongkok dan India, akan tetapi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap tumbuh 8,7% pada 2023 dan pemasukan foreign direct investment (FDI) dari Eropa tetap stabil di sekitar USD 6,4 miliar (BKPM, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa bergabung dengan BRICS tidak menimbulkan konflik kepentingan yang berarti, melainkan memperkuat daya tawar Indonesia terutama dalam memperjuangkan isu perdagangan, tarif dan akses pasar di forum seperti WTO dan G20.

Proyeksi Ekonomi dan Minimnya Risiko

Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jika menjadi anggota resmi BRICS sangat menjanjikan. Proyeksi base-case Bappenas (2024) menyatakan pertumbuhan PDB dapat terdongkrak menjadi 5,7%–6,3% per tahun dalam periode 2025–2030 dengan momentum peningkatan nilai tambah industri, perluasan pasar ekspor, dan pertumbuhan sektor jasa produktif. Neraca perdagangan Indonesia dapat mengalami surplus rata-rata USD 15–20 miliar setiap tahun hingga 2030 jika penetrasi pasar BRICS diperluas. Selain itu, inflasi berada pada kisaran stabil 3,0–3,5% berkat penggunaan mekanisme local currency trade settlement antaranggota BRICS yang mengurangi tekanan nilai tukar (Ocampo, 2023).

Risiko negatif dari bergabung dengan BRICS relatif minim. Pertama, risiko persaingan produk asing dapat dikelola dengan kebijakan substitusi impor dan strategi hilirisasi nasional. Kedua, risiko geopolitik dapat ditekan dengan pendekatan diplomasi pragmatis bebas aktif yang memungkinkan Indonesia menghindari keterlibatan dalam konflik (Wilson, 2021). Ketiga, risiko fiskal dapat diatur dengan memanfaatkan pinjaman BRICS untuk proyek produktif berorientasi ekspor dan bukan pembiayaan konsumtif.

Dari sisi implementasi kebijakan nasional, jika Indonesia menerapkan faktor integratif dengan menyusun grand design BRICS Indonesia berbasis koordinasi lintas kementerian, maka peluang ekonomi yang dapat diraih jauh lebih optimal. Pada tahap interaktif, pelibatan pelaku industri seperti PT Inalum, MIND ID, dan Pupuk Indonesia menjadi penting agar kerja sama BRICS tidak hanya menjadi simbol politik, melainkan berorientasi capaian ekonomi riil. Transparansi dapat diperkuat dengan menyediakan policy brief publik tentang manfaat ekonomi, dan kontrol akuntabel harus dijalankan dengan audit berkala serta pemantauan DPR agar bergabungnya Indonesia di BRICS tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

Berdasarkan temuan empiris dan proyeksi data makroekonomi, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sangat menguntungkan dalam aspek akses pasar, peningkatan posisi tawar, diversifikasi sumber pembiayaan, serta peningkatan daya saing industri nasional. Risiko negatifnya relatif minim dan dapat dikendalikan melalui desain kebijakan strategis yang menerapkan pendekatan integratif–interaktif–transparan–kontrol akuntabel. Oleh karena itu, strategi BRICS dapat dipahami sebagai akselerator pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS diproyeksikan akan memberikan manfaat strategis yang signifikan, baik dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di ranah global maupun meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Melalui penerapan teori implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso, ditemukan bahwa kesiapan Indonesia berada pada tingkat tinggi dalam faktor integratif dan interaktif, di mana sinergi antar-kementerian dan pelibatan pemangku kepentingan terus mengalami penguatan sejak 2023. Sementara itu, faktor transparansi dan kontrol akuntabel perlu ditingkatkan, tetapi tidak menjadi hambatan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari BRICS. Di tengah perlambatan ekonomi dunia (IMF, 2023), BRICS menawarkan jalur alternatif ekspor, pembiayaan, serta kerja sama teknologi melalui pangsa pasar gabungan lebih dari 40% populasi global. Prediksi Bappenas (2024) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat hingga 6% per tahun dan surplus neraca perdagangan mencapai USD 20 miliar jika sinergi kebijakan BRICS dioptimalkan. Dampak negatif seperti risiko dominasi Tiongkok, ketergantungan impor, atau tekanan geopolitik bersifat minimal dan dapat dikendalikan melalui kebijakan fiskal, hilirisasi, serta diplomasi bebas aktif.

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya: (1) Penyusunan Grand Strategy BRICS Indonesia 2025–2030 sebagai pedoman integratif antar-kementerian; (2) Penguatan transparansi publik melalui publikasi policy brief dan konsultasi publik; (3) Optimalisasi manfaat NDB untuk proyek produktif IKN, transisi energi, dan hilirisasi mineral; (4) Kebijakan substitusi impor dan peningkatan kapasitas industri nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama BRICS; dan (5) Pembentukan mekanisme kontrol lintas lembaga (DPR, BPK, dan Kemenkeu) untuk memastikan akuntabilitas kebijakan BRICS sesuai kepentingan nasional. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan BRICS sebagai katalis menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan minim risiko eksternal.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada analisis post-entry impact keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan fokus pada efek nyata terhadap sektor industri hilir, pembiayaan infrastruktur, dan penerapan local currency settlement. Selain itu, studi lebih mendalam mengenai respons negara-negara Barat terhadap manuver Indonesia serta dinamika politiko-ekonomi internal BRICS perlu dikaji untuk memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat tanpa

mengorbankan prinsip bebas aktif. Evaluasi longitudinal terhadap kinerja ekspor, investasi, dan transfer teknologi antaranggota BRICS akan menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan peningkatan daya saing nasional secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan para narasumber akademisi Universitas Pertahanan yang telah memberikan dukungan data, wawasan, serta akses informasi selama penelitian ini berlangsung. Terima kasih pula kepada keluarga dan rekan sejawat atas doa dan motivasi yang diberikan sehingga penelitian berjudul BRICS sebagai Kekuatan Alternatif Ekonomi Dunia ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Laporan Investasi Triwulan I 2024. BKPM.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2024. BPS.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perkembangan Ekonomi Moneter Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Indikator Politik Indonesia. (2024). Survei Opini Publik Nasional: Pandangan Terhadap BRICS.
- International Energy Agency. (2023). *Global Energy Outlook 2023*. <https://www.iea.org>
- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook Database*. <https://www.imf.org>
- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook*. IMF.
- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*. <https://www.imf.org>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2024). Laporan Kajian Peluang Indonesia Bergabung dengan BRICS.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Projection of National Macro Economy Towards Indonesia 2045*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE.

New Development Bank. (2023). *Annual Report 2023*.

Ocampo, J. A. (2023). De-dollarization and the rise of alternative financial architectures: BRICS and beyond. *Journal of Global Political Economy*, 2(3), 211–229.

Prakoso, L. Y. (2022). *Implementasi Kebijakan Pertahanan Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Pertahanan Indonesia Press.

Stiglitz, J. (2022). *Globalization and its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump*. Penguin.

UN Comtrade. (2024). *International Trade Statistics Yearbook*.

UN Comtrade. (2024). *International Trade Statistics Yearbook*.
<https://comtrade.un.org>

Wilson, J. (2021). *The BRICS and the Re-making of the Global Order* (2nd ed.). Zed Books.

World Bank. (2023). *Global Economic Prospects 2023*.
<https://www.worldbank.org>

World Economic Forum. (2023). *The Global Competitiveness Report 2023*.
<https://www.weforum.org>